**Peranan Camat dalam Mengkoordinir Peningkatan Pembangunan**

**di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang**

**ANDI HETTY RAUF**

**Abstract**

This study aimed to determine the role of sub-district head in coordinating the development and improvement along with the influencing factors about development improvement at Tiroang District in Pinrang Regency. The population took 31 persons, consisted of 21 Tiroang District Office employees, the head of five (5) villages, and another five from the chairman of the village social institutions (EHS). The whole population were taken as samples, and as an informant was the secretary of Tiroang District. Data collection methods used were observation, questionnaires, interviews, and technical literature. The collected data was then analyzed by means of qualitative analysis techniques with a table percentage.

The results showed that the role of district head as coordinator in improving the development of three sub-indicators were rated very well with a score of 3,40. Whereas the influencing factors, namely district head’s capability were rated very well with a score of 3,32, responsibility factor was also rated very well with 3,65, participation factor was rated 3,16, and finally excellent cooperation at 3,35 score.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh ke seluruh pelosok tanah air. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri.

Sejak diberlakukan Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999, sentralisasi pembangunan mulai berkurang. Perencanaan pembangunan semakin terdesentralisasi, daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Adanya peningkatan kemandirian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan pembangunan yang giat-giatnya dilaksanakan dewasa ini bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga tanggung jawab semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan perlu adanya kesadaran dan partisipasi dari seluruh masyarakat. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Dalam pelaksanaan pembangunan pihak pemerintah juga dapat memanfaatkan potensi keuangan daerah guna membiayai pembangunan. Aspek yang tak kalah pentingnya adalah pelaksana pembangunan, yaitu aparat dan pemimpin suatu lembaga pemerintah yang merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang di dalam pasal 126 ayat (3) mengungkapkan bahwa camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan pemerintah masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Dalam kondisi demikian tidaklah mudah untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintah terutama dalam hal fungsi koordinasi camat terhadap instansi-instansi, baik vertikal maupun otonom yang ada di kecamatan. Pembangunan yang sudah direncanakan di tingkat kecamatan oleh aparat pemerintah sering tidak berjalan seperti yang diharapkan. Keikutsertaan semua pihak dalam pembangunan daerah di kecamatan sangatlah menentukan pula, oleh karena itu bagaimanapun potensi daerah yang dimiliki jika aparatur pelaksananya kurang memahami keterpaduan pembangunan dengan sendirinya tujuan pembangunan kecamatan juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kita mengapa tidak ada suatu kebersamaan dan keterpaduan dari masing-masing instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama.

Dari contoh di atas kita dapat melihat bahwa sebenarnya sudah terbentuk suatu kerjasama yang mendukung pencapaian suatu tujuan, namun karena tidak adanya koordinasi di dalam melakukan suatu kegiatan maka kegiatan tersebut berjalan kurang efektif walaupun tujuannya sama.

Sehubungan dengan kedudukan camat sebagai koordinator dalam peningkatan pembangunan maka peranan camat sangat diperlukan dalam hal mengkoordinasikan setiap gerak langkah tindakan segenap perangkat pemerintah, baik instansi-instansi vertikal maupun dinas-dinas daerah serta kepala desa/lurah yang ada dalam wilayah kerjanya demi kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan masyarakat.

Kemampuan camat dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayahnya akan memberikan kemajuan dan mempercepat tercapainya cita-cita dan tujuan pembangunan. Untuk meningkatkan laju pembangunan, tidak saja bersumber dari pemerintah, tetapi juga didukung oleh masyarakat dan lingkungan yang stabil. Lingkungan yang stabil adalah situasi dan kondisi yang mendukung dan mempermudah program-program dan strategi pembangunan. Sebagai seorang pemimpin tentu memiliki strategi dan cara tertentu dalam kedudukannya sebagai pemimpin pelaksana pembangunan karena dalam diri seorang camat tentu memiliki tingkah laku, perbuatan yang membedakan dari pemimpin lain seperti pemimpin organisasi pemuda atau organisasi masyarakat lainnya.

1. Koordinasi

Istilah koordinasi berasal dari bahasa Inggris *“Coordination”*, kata *coordinate* terbentuk dari dua akar kata, yaitu *Co* dan *Ordinate* yang mempunyai arti mengatur, berasal dari bahasa latin yakni *cum* berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada keharusannya. Dengan demikian dalam istilah koordinasi adalah terkandung makna pengaturan.

Koordinasi berkaitan dengan penempatan berbagai kegiatan yang berbeda-beda pada keharusan tertentu, sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya melalui proses yang tidak membosankan. Koordinasi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, saling membantu dan saling melengkapi.

Koordinasi adalah proses saling mengerti antara dua orang atau lebih melaksanakan suatu hal. Proses yang harus dijalankan agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar ataupun jika ada masalah tidak akan terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya.

Teori koordinasi menurut beberapa ahli seperti berikut:

1. Menurut Handoko (2003:195) koordinasi *(coordination)* sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksananya.
2. Nawawi (1989:40) koordinasi adalah kegiatan mengatur dan membawa personal, metode, bahan, buah pikiran, saran-saran, cita-cita dan alat-alat dalam lingkungan kerja yang harmonis, saling isi mengisi dan saling menunjang sehingga pekerjaan berlangsung efektif dan seluruhnya terarah pada pencapaian tujuan yang sama.
3. Sedangkan menurut James D. Money (1994:61) mengemukakan bahwa *Coordination as the achievement of orderly group efforts, and unity factien is the pursuit of commom purpose* (koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan merupakan usaha pencapaian tujuan bersama).

Koordinasi hanya dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang harmonis. Karena hubungan kerja itu sendiri merupakan bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi yang berdaya guna oleh penyelenggara pemerintahan atau suatu organisasi. Khususnya di kecamatan, maka sangatlah penting menjaga dan menjalin erat hubungan yang harmonis dengan instansi-instansi terkait yang melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Handayadiningrat (1992:133) mengemukakan karakteristik koordinasi sebagai berikut:

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan, oleh karena itu koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab pimpinan, sehingga dapat dikatakan bahwa pimpinan bisa berhasil jika melakukan koordinasi.
2. Koordinasi adalah kerja sama. Hal ini disebabkan kerja sama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi.
3. Koordinasi merupakan proses terus menerus *(continue process)*. Dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga.
4. Pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan koordinasi adalah konsep yang diterapkan dalam kelompok, bukan usaha individu melainkan individu bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
5. Kesatuan tindakan merupakan inti koordinasi. Pimpinan merupakan pengatur usaha-usaha dan tindakan-tindakan setiap individu sehingga diperoleh keserasian dalam mencapai hasil bersama.
6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*) kesatuan usaha yang meminta kesadaran semua pihak melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok tempat mereka bekerja.

Koordinasi sangat diperlukan dalam manajemen, terutama untuk menyatukan kesamaan pandangan antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan kegiatan dan tujuan organisasi. Koordinasi diperlukan untuk menghubungkan bagian satu dengan bagian yang lain sehingga tercapai suatu kegiatan yang terpadu mengarah pada tujuan umum lembaga sebagaimana jari-jari kerangka payung, tanpa koordinasi spesialisasi dan pembagian kerja yang dilakukan pada setiap usaha kerjasama yang dilakukan akan sia-sia karena setiap bagian cenderung hanya memikirkan pekerjaan atau tugas masing-masing dan melupakan tujuan lembaga secara keseluruhan.

Melalui koordinasi setiap bagian yang menjalankan fungsi dengan spesialisasi tertentu dapat disatupadukan dan dihubungkan satu sama lain sehingga dapat menjalankan peranannya secara selaras dalam mewujudkan tujuan bersama. Koordinasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan lembaga. Manfaat koordinasi dalam manajemen menurut Mulyasa (2011:133) adalah sebagai berikut:

1. Menghilangkan dan menghindarkan perasaan terpisah satu sama lain antara atasan dan bawahan.
2. Menghindarkan perasaan atau pendapat bahwa dirinya atau jabatannya merupakan yang paling penting.
3. Mengurangi dan menghindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antar pejabat dan pelaksana.
4. Menghindarkan timbulnya perebutan fasilitas.
5. Menghindarkan terjadinya peristiwa menunggu yang memakan waktu lama.
6. Menghindarkan kemungkinan terjadinya kesamaan pekerjaan suatu kegiatan.
7. Menghindarkan kemungkinan kekosongan pekerjaan suatu program atau kekosongan pengerjaan tugas oleh para manajer.
8. Menumbuhkan kesadaran tugas oleh para manajer untuk saling memberikan bantuan satu sama lain terutama bagi mereka yang berada dalam wilayah yang sama.
9. Menumbuhkan kesadaran para manajer untuk saling member tahu masalah yang dihadapi bersama dan bekerjasama dalam memecahkannya.
10. Memberikan jaminan tentang kesatuan langkah di antara para atasan atau bawahan.
11. Menjamin adanya kesatuan langkah dan tindakan di antara manajer.
12. Menjamin kesatuan sikap di antara manajer.
13. Menjamin kesatuan kebijaksanaan di antara manajer dalam wilayah tertentu.

Di samping itu, manfaat koordinasi dalam manajemen antara lain dapat mencegah pertengkaran antar lembaga karena berebut kekuasaan atau wewenang, dapat menghindari saling lempar kewajiban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, dapat mencegah terjadinya kesimpangsiuran, dapat mengembangkan prakarsa dan daya improvisasi para petugas. Dalam rangka koordinasi, mereka mau tidak mau harus mendapatkan cara dan jalan yang cocok bagi pelaksanaan tugas secara menyeluruh dan mencapai keseimbangan serta keserasian.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah yang sampai saat ini masih menjadi acuan pelaksanaan koordinasi pemerintahan, juga disebutkan bahwa koordinasi pemerintahan adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah (Camat bukan Kepala Wilayah) guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menempatkan camat bukan lagi sebagai kepala wilayah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota, namun bukan berarti prinsip-prinsip koordinasi sudah tidak dijalankan. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, camat, sekretaris camat, dan kepala seksi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar instansi lainnya.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan masih sangat diperlukan koordinasi. Apalagi dengan otonomi daerah ini, di kecamatan akan mungkin terbentuk unit pelayanan terpadu yang terdiri dari beberapa cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas yang kesemuanya perlu dikoordinir secara baik agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen di samping fungsi perencanaan, penyusunan, pengadaan, pembinaan kerja, motivasi dalam pengawasan, dalam pelaksanaan membawa manfaat bagi pencapaian tujuan organisasi. Adapun prinsip-prinsip koordinasi adalah:

1. Koordinasi harus dimulai dari tahap awal perencanaan awal.
2. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam koordinasi adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi kepentingan bersama.
3. Koordinasi merupakan proses terus-menerus dan berkesinambungan.
4. Koordinasi merupakan pertemuan-pertemuan bersama untuk mencapai tujuan.
5. Perbedaan pendapat harus diakui sebagai pengayaan dan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam kaitannya dengan situasi secara keseluruhan.

Koordinasi akan berlangsung secara efektif apabila dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dari tahap awal sampai akhir pekerjaan, mengupayakan hubungan dan pertemuan-pertemuan di antara berbagai pihak yang terkait serta mengembangkan keterbukaan sehingga jika terdapat perbedaan pandangan dapat didiskusikan dan dipecahkan bersama.

Jenis-jenis koordinasi menurut Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah pasal 1 (satu), ada tiga jenis koordinasi yaitu:

1. Koordinasi fungsional, yaitu antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat.
2. Koordinasi instansional, yaitu terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan.
3. Koordinasi territorial, yaitu terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu.

Berdasarkan arah kegiatannya dapat diidentifikasikan adanya koordinasi vertikal, horisontal, fungsional, dan diagonal. Sejalan dengan uraian di atas, koordinasi berdasarkan hubungan antara pejabat yang mengkoordinasikan dan pejabat yang dikoordinasikan sebagai berikut:

1. Koordinasi *intern,* terbagi menjadi tiga yaitu:
2. Koordinasi vertikal atau struktural, yaitu antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hirarkis atau pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya, hal ini dapat juga dikatakan koordinasi yang bersifat garis komando *(line command).*
3. Koordinasi horisontal, yaitu koordinasi fungsional, kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan setingkat eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu sama lain sehingga perlu dilakukan koordinasi. Koordinasi horisontal terbagi:
4. *Interdiciplinary,* koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan, mewujudkan, menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.
5. *Inter-related,* koordinasi antara badan/instansi, unit-unit yang fungsinya berbeda tetapi instansinya saling berkaitan secara intern-ekstern yang selevel.

3) Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi fungsional, yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada satu garis komando *(line of command).*

b. Koordinasi *ekstern*, termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi *ekstern* yang bersifat fungsional, koordinasi itu hanya bersifat horisontal dan diagonal yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Koordinasi menjadi atasan dengan bawahan, yang disebut koordinasi vertikal.
2. Koordinasi di antara sesama pejabat yang setingkat dalam instansi, disebut koordinasi horisontal.

Koordinasi fungsional, koordinasi antar instansi, tiap-tiap instansi mempunyai tugas dan fungsi dalam suatu bidang tertentu. Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijaksanaan dan program oleh seluruh badan pemerintahan. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran antara tujuan yang diiginkan merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor dan antar lembaga organisasi. Hambatan yang sering dijumpai dalam pelaksanaannya adalah kurangnya koordinasi. Memang perlu disadari bahwa tugas-tugas yang paling sulit bagi pemerintah sebagai suatu organisasi yang besar dan kompleks adalah tugas-tugas menyerasikan atau menghubungkan kegiatan antara unit yang satu dengan unit yang lainnya.

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen dimana hakikat koordinasi adalah menyatukan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkutpautkan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut menjadi satu unit kerja.

Menurut Supriatna (1983:32) bahwa mengingat pentingnya masalah koordinasi terutama di dalam pelaksanaan berbagai program pada sektor atau antar sektor, terutama program yang memperoleh prioritas dan melibatkan berbagai departemen/lembaga, maka perlu diperhatikan:

1. Siapa atau badan/lembaga mana yang secara fungsional akan diserahi wewenang mengkoordinasikan program suatu sektor atau antar sektor.
2. Penyusunan program pelaksanaan apakah sudah baik dan jelas.
3. Prinsip fungsionalisasi dalam program pelaksanaan apakah sudah dituangkan ke dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
4. Hubungan kerjasama, apakah sudah dikembangkan dengan baik.

Tanpa adanya koordinasi, individu-individu dan bagian-bagian tidak dapat melihat peranan mereka sendiri, seiring dengan mengorbankan sasaran-sasaran organisasi yang lebih luas. Begitu pentingnya masalah koordinasi sehingga perlu juga diketahui tentang syarat-syarat koordinasi sebagai berikut:

1. *Sense of cooperation,* perasaan untuk saling bekerjasama, dilihat per-bagian.
2. *Rivalry,* dalam perusahaan besar, sering diadakan persaingan antara bagian agar saling berlomba untuk kemajuan.
3. *Team spirit,* satu sama lain per-bagian harus saling menghargai.
4. *Esprit de corps,* bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.
5. Camat sebagai Koordinator Pembangunan

Seorang camat merupakan kepala pemerintahan di tingkat kecamatan yang membawahi pemerintahan tingkat desa dan kelurahan. Untuk melaksanakan pemerintahan pada wilayah kecamatan, maka mutlak diperlukan pelaksana koordinator yang berkualitas dibidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan roda pembangunan di wilayah kecamatan itu sangat ditentukan oleh kualitas dari pada peranan kepala wilayah kecamatan itu sendiri.

Camat sebagai kepala wilayah diberi hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan dan meningkatkan pembangunan di wilayahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah maupun pusat tidak mungkin mengetahui sampai sekecil-kecilnya keadaan dan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, fungsi koordinasi harus benar-benar difungsikan sesuai kewenangan dan tanggung jawab camat.

Menurut Arifin Abdurachman (2001:83) tujuan koordinasi adalah untuk mencegah kesimpangsiuran serta untuk mengarahkan, sehingga setiap yang dikoordinasikan itu dapat mencapai tujuannya masing-masing dengan aman dan berhasil. Pelaksanaan koordinasi harus sesuai dengan batas-batas kewenangan dari setiap camat dalam rangka otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Hal ini menunjukkan posisi camat sangat penting. Sehubungan dengan hal tersebut maka tugas, wewenang, dan tanggung jawab camat dalam pembangunan adalah camat sebagai seorang eksekutif, seorang pelaksana tugas pemerintah. Tugas eksekutif dirumuskan dalam perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pemimpin, dan koordinasi.

Koordinasi pembangunan sangat penting sebagaimana dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusuma (2003:312) bahwa:

1. Koordinasi dalam pembangunan sangat diperlukan sebagai suatu konsekuensi logis dari adanya aktivitas dan kepentingan yang berbeda.
2. Aktivitas yang berbeda jangan membawa konsekuensi logis terhadap adanya tanggung jawab yang secara fungsional berbeda pula.
3. Ada institusi, badan, lembaga yang menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.
4. Koordinasi merupakan alat sekaligus upaya untuk melakukan penyelarasan dalam proses pembangunan sehingga akan tercipta suatu aktivitas yang harmonis, sinergis dan serasi untuk menciptakan tujuan bersama.

Wewenang, tugas, dan kewajiban camat dalam pembangunan adalah memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan mengarahkan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan serta mengatur pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan jalannya pembangunan di wilayahnya, memberikan laporan tentang hasil pelaksanaan pembangunan masyarakat kepada atasannya dengan jenjang hirarkis. Selain itu, camat harus mengetahui tugas-tugas jawatan dinas dan instansi vertikal dalam wilayahnya, sehingga masing-masing pihak harus mengerti akan tujuan koordinasi terhadap sesuatu tugas untuk mencapai tujuan.

Dalam hal peningkatan pembangunan, camat seharusnya memberi peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, secara teoritis menurut Conyers (Soetomo, 2009: 345) dapat dilakukan melalui:

1. Konsultasi dan *survey* untuk mendapatkan masukan dari lapangan.
2. Penggunaan petugas lapangan dari masing-masing instansi sebagai sumber informasi.
3. Desentralisasi perencanaan pada lembaga-lembaga di bawahnya.
4. Pemberian kewenangan pada lembaga di bawahnya.
5. *Community development.*

Peranan camat juga masih diperlukan fungsinya untuk menjembatani program-program dari atas yang melibatkan masyarakat, sebagai jembatan yang baik melalui terjalinnya hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah kecamatan dapat mendorong berlangsungnya komunikasi dua arah. Menurut Kartono (2001:67), pemimpin harus mengenal dengan baik sifat-sifat pribadi para pengikutnya, mampu menggerakkan semua potensi dan tenaga seoptimal mungkin dalam setiap usahanya demi suksesnya organisasi. Dalam rangka fungsinya sebagai wadah yang mengkoordinir program-program pembangunan seorang camat harus memberi motivasi yang melatarbelakangi masyarakat melaksanakan program-program pemerintah kecamatan.

Camat mempunyai peranan penting dalam pembangunan karena tanpa keterlibatan camat sebagai pemerintah setempat maka pembangunan yang dilaksanakan sulit berhasil dengan baik, jadi bagaimanapun juga keikutsertaan camat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tetap memegang peranan yang sangat penting, demikian pentingnya peranan seorang pemimpin sehingga dikatakan bahwa berhasil dan tidaknya pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu daerah ditentukan oleh kepemimpinan pemerintah daerahnya.

1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peranan Camat

Pada masa setelah berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan kemudian berubah menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, camat tidak menjadi kepala wilayah, melainkan sebagai perangkat kabupaten. Jadi secara hukum posisi camat sejajar dengan posisi kepala dinas dan desa/lurah.

Untuk menjadi pemimpin seorang camat harus mampu mempengaruhi orang lain dan sebagai pembina berarti camat itu haruslah membina masyarakat yang ada di wilayahnya dengan pengalaman-pengalaman dan keterampilan yang dimiliki. Camat dapat menjadi sesepuh di masyarakatnya, dalam kekhasan dan kekhususan tugas camat yang membawanya ke kedudukan sebagai koordinator di wilayahnya. Secara singkat camat ditentukan sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan.

Menurut Farren dan Kaye (Yopi Arsyah Putra, 2011:9) bahwa kesuksesan seorang pemimpin dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu:

1. Kemampuan, yaitu camat dalam menjalankan kepemimpinan harus memiliki kemampuan memberi petunjuk dan pengarahan kepada bawahannya, serta memiliki kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan dan sekaligus memiliki kemampuan administrator.
2. Tanggung jawab, yaitu camat dalam menjalankan kepemimpinannya harus memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap fungsinya sebagai administrator di segala bidang untuk mencapai sasaran yang akan dicapai.
3. Partisipasi, yaitu camat dalam menjalankan kepemimpinannya harus turut berpartisipasi dengan bawahannya agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
4. Kerjasama, yaitu camat dalam menjalankan kepemimpinannya juga harus melakukan koordinasi ataupun kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat agar tujuan yang akan dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Farren dan Kaye menyatakan bahwa pemimpin masa kini dan yang akan datang harus mampu memainkan peran sebagai fasilitator, peramal, penasehat, dan pemampu *(enabler)*, sebagai seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam mengorganisasikan masyarakat, memiliki sifat bertanggung jawab, ikut berpartisipasi langsung dengan masyarakat, dan memiliki jiwa kerjasama yang baik.

1. METODE PENELITIAN

Sebagai obyek penelitian dalam memperoleh data dan informasi, maka peneliti mengadakan penelitian di Kantor Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, tepatnya di jalan poros Pinrang-Rappang Km.7 No. 145 Pinrang. Kecamatan Tiroang merupakan salah satu kecamatan di antara dua belas kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang, berada di sebelah timur dari pusat kota dengan jarak 7 km dari Ibukota Kabupaten Pinrang yang berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Alasan memilih lokasi ini karena kantor ini mempunyai posisi yang strategis dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Tiroang, di samping itu lokasi penelitian ini dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat mengefisienkan waktu dan biaya.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada obyek yang diteliti, data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif di mana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dinyatakan (Sugiyono, 2003:17). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan camat dalam mengkoordinir peningkatan pembangunan di Kecamatan Tiroang.

Pangestu Subagyo dan Djarwanto (Torang, 2012:175) mengatakan bahwa populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek satuan-satuan/individu-individu yang karakteristiknya hendak digunakan. Wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik. Populasi adalah kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin kita buat informasi, populasi adalah berkenaan dengan data, bukan dengan orangnya ataupun bendanya. Populasi sebagai sasaran dalam penelitian ini adalah berjumlah 31 orang.

Sampel dalam penelitian ini yaitu sampel total atau penelitian sensus, yakni keseluruhan dari populasi karena populasinya tidak terlalu besar, maka peneliti mengambil sampel yaitu keseluruhan dari populasi yang berjumlah 31 orang. Arikunto (2006:134) mengemukakan bahwa untuk sekedar incaran, maka apabila subyek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, dan sebagai informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Camat Tiroang Kabupaten Pinrang yang nantinya penulis mengadakan wawancara mengenai masalah yang akan diteliti.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara *(Interview)*, kuisioner, dan studi kepustakaan. Dalam menentukan penilaian terhadap jawaban responden maka penulis menggunakanSkala Likers. Sugiono (2005:107) menyatakan bahwa Skala Likers digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan Skala Likers, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Camat Tiroang sebagai pemimpin harus mampu mengkoordinir, mengawasi berbagai kegiatan yang dijalankan oleh setiap instansi dan dinas-dinas yang ada di wilayahnya. Sehubungan dengan hal tersebut Camat Tiroang berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan, serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dengan kata lain camat adalah administrator pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui betapa pentingnya peranan camat dalam melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan. Camat adalah sebagai stabilisator, inovator, dan administrator masyarakat ke arah usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan di wilayahnya. Stabilisator artinya camat harus senantiasa menciptakan keadaan tertib, tenang, dan aman dalam masyarakat. Demikian pula camat sebagai inovator artinya selalu menempatkan diri sebagai sumber ide baru bagi aparatnya dan masyarakat pada umumnya. Camat sebagai administrator pembangunan dituntut untuk berperan lebih dominan yang mampu mengerakkan dan memotivasi serta mengatasi setiap permasalahan yang ada di wilayahnya.

Hasil penelitian menunjukkan peranan camat sebagai pelaksana pemerintahan, dalam hal ini camat sebagai pelaksana dan juga mengawasi jalannya roda pemerintahan dan pembangunan, di mana 17 responden (54,8%) responden menyatakan baik, 12 responden (38,7%) menyatakan sangat baik, 2 responden (6,5%) menyatakan kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik. Hasil tersebut dikategorikan sangat baik dengan skor 3,32.

“Bahwa camat tiroang sebagai kepala pemerintahan pada tingkat kecamatan, camat selalu memelihara lancarnya roda pemerintahan, memelihara keamanan dan ketertiban, serta melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang diamanatkan kepadanya, selain itu camat juga melakukan koordinasi dalam hal pengawasan antara instansi vertikal dan dinas-dinas daerah yang berada pada daerah kepemimpinanya.” (Hasil wawancara tanggal 24 Juni 2013 dengan Sekretaris Camat Tiroang Arifin Arfa, S.STP.)

Peranan Camat Tiroang sangat mempengaruhi tingkat kemajuan pembangunan di kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemajuan pembangunan di Kecamatan Tiroang dikategorikan sangat baik dengan skor 3,32, di mana 19 responden (61,3%) menyatakan baik, 11 responden (35,5%) menyatakan sangat baik, dan satu responden (3,2%) menyatakan kurang baik.

“Menyatakan sangat setuju di mana tingkat pembangunan dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan, hal ini dapat dilihat dengan dibangunnya sarana dan prasarana yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat di Kecamatan Tiroang, hasil evaluasi tingkat pembangunan yang ada di Kecamatan Tiroang dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang sangat pesat ini berkat peran serta pemerintah dan juga kerjasama yang baik dengan masyarakat Kecamatan Ttiroang dan juga instansi-instansi yang berwenang.” (Hasil wawancara pada tanggal 24 Juni 2013)

Untuk mengetahui lebih jelas sejauh mana peningkatan pembangunan di Kecamatan Tiroang dapat dibagi dalam dua bidang pembangunan sebagai berikut:

* 1. Bidang sosial

1. Sarana Pendidikan

Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dengan merubah tingkat pendidikan masyarakat ke arah yang lebih baik. Pemerintah Kecamatan Tiroang telah mengupayakan peningkatan pendidikan karena ukuran keberhasilan dan kemajuan suatu daerah salah satu indikatornya adalah tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi.

Peranan pemimpin pemerintah kecamatan sangat besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah kecamatan seperti dengan memberikan bimbingan dan bantuan teknis yang dapat memperlancar program pendidikan. Pemerintah Kecamatan Tiroang dalam menunjang program pembangunan di bidang pendidikan telah berupaya membangun sarana-sarana pendidikan.

Sarana pendidikan formal yang ada di Kecamatan Tiroang mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Umum. Sedangkan tingkat perguruan tinggi masyarakat lebih banyak yang melanjutkan ke ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi karena belum ada di Kecamatan Tiroang. Meskipun demikian, sarana pendidikan yang ada dirasakan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat.

1. Sarana Kesehatan

Selain pembangunan sarana pendidikan, pemerintah Kecamatan Tiroang juga mengupayakan pembangunan sarana kesehatan masyarakat yang tidak kalah pentingnya dengan sarana lainnya. Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat tidak hanya dengan membangun sarana kesehatan tetapi diperlukan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya kesehatan.

Pemerintah Kecamatan Tiroang telah berupaya melengkapi sarana kesehatan dengan membangun Puskesmas, Pustu, Posyandu, dan sarana olahraga.

Tetapi yang menjadi kendala adalah jumlah puskesmas yang relatif sedikit yang hanya terdapat di satu kelurahan dari kelima kelurahan, sehingga mempersulit masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah di tingkat kecamatan agar melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan.

1. Sarana Peribadatan

Masyarakat Kecamatan Tiroang mayoritas adalah pemeluk agama Islam sekitar 99% dan selebihnya adalah pemeluk agama lain. Fasilitas peribadatan yang ada adalah mesjid dan mushallah, sedangkan pemeluk agama lain beribadah di ibu kota kabupaten karena belum ada di tingkat kecamatan. Selain mendirikan sarana peribadatan pemerintah kecamatan juga menganjurkan agar menjaga toleransi dan kerukunan beragama di Kecamatan Tiroang.

1. Bidang Ekonomi
2. Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta merupakan pusat perekonomian masyarakat. Di Kecamatan Tiroang pasar selain diusahakan oleh pemerintah juga merupakan hasil swadaya masyarakat seperti pasar yang ada di Kelurahan Marawi merupakan hasil swadaya masyarakat.

Sebagian besar kelurahan tidak memiliki pasar hanya terdapat satu pasar utama. Hal ini sangat mempersulit masyarakat dalam memasarkan hasil pertanian dan perkebunan serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat yang cukup jauh.

1. Bank / Lembaga Perkreditan

Bank dapat membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Di Kecamatan Tiroang hanya terdapat satu-satunya bank pemerintah yang terdapat di Kelurahan Marawi dan bank inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

1. Transportasi / Jalan

Berdasarkan hasil penelitian, sarana trasportasi di Kecamatan Tiroang cukup memadai. Pemerintah kecamatan telah berupaya dalam membangun sarana transportasi seperti jalan provinsi, jalan daerah, dan jalan kelurahan. Tetapi tidak semua jalan mendapat perhatian pemerintah, hanya jalan-jalan yang ada di ibu kota kecamatan menjadi sasaran pembangunan sehingga kelurahan yang jauh dari ibu kota kecamatan kurang mendapat perhatian. Masih adanya jalan yang tidak dapat ditempuh dengan kendaraan menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan. Hal ini menuntut kepedulian pemerintah kecamatan agar perlunya peningkatan pembangunan sarana transportasi / jalan.

1. Penerangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerangan di Kecamatan Tiroang sudah sangat memadai hal ini terbukti dengan sudah terpenuhinya fasilitas penerangan sampai saat ini. Hal ini berkat koordinasi pemerintah kecamatan dengan pihak PLN setempat dengan memperluas jaringan instalasi listrik di semua daerah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diperoleh gambaran mengenai peningkatan pembangunan di Kecamatan Tiroang. Adanya hambatan dalam pembangunan, camat selaku pemerintah kecamatan diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembangunan yang direncanakan oleh camat dikategorikan sangat baik dengan skor 3,55, karena program pembangunan yang dilakukan oleh Camat Tiroang dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Camat Tiroang pada tanggal 24 Juni 2013, yakni:

“Program pembangunan yang direncanakan camat sudah sangat baik, karena dalam setiap pengambilan keputusan terutama dalam hal perencanaan pembangunan, Camat Tiroang selalu melakukan diskusi dan musyawarah dengan aparatur maupun dengan masyarakat, hal ini dilakukan dengan mengadan rapat-rapat posko setiap bulan, Camat Tiroang juga selalu mengikuti musyawarah rencana pembangunan, baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan di tingkat kabupaten.”

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peranan Camat dalam Peningkatan Pembangunan di Kecamatan Tiroang.
2. Kemampuan

Faktor kemampuan sangat mempengaruhi peranan camat, hal ini erat kaitannya terhadap kemampuan camat dalam melaksanakan tugas-tugasnya terutama dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil olahan data menunjukkan bahwa 19 responden (61,3%) menyatakan baik dalam hal kemampuan camat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin dengan skor 3,32 dikategorikan sangat baik, sesuai dengan kenyataan di lapangan di mana Camat Tiroang mampu menyelesaikan semua tugas-tugas pemerintahan, terutama dalam hal kemampuannya meningkatkan pembangunan di Kecamatan Tiroang.

1. Tanggung jawab

Sebagai seorang pemimpin di wilayah kecamatan camat harus dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di kecamatan. Tanggung jawab camat merupakan perwujudan akan tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Camat Tiroang dalam meningkatkan pembangunan. Dari hasil olahan data dapat diketahui tanggung jawab camat terhadap peningkatan pembangunan di Kecamatan Tiroang, di mana 21 responden (67,7%) menyatakan sangat baik, 9 responden (29,1%) menyatakan baik, dan satu responden (3,2%) menyatakan kurang baik. Hasil kategorinya sangat baik dengan skor 3,65.

Hasil wawancara tanggal 24 Juni 2013 antara lain menyebutkan:

“Tanggung jawab camat cukup baik, ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas-tugasnya yang merupakan hal yang paling penting karena merupakan tanggung jawab camat terhadap masyarakat, hal ini menunjukkan tingkat kepedulian Camat Tiroang terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin di wilayahnya”.

1. Partisipasi

Pembangunan akan lancar jika didukung oleh partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat berupa pemberian ide atau gagasan maupun dalam bentuk materi dan tenaga. Tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tiroang dalam pembangunan berdasarkan hasil olahan data menunjukkan bahwa peranan Camat Tiroang dalam mengerakkan partisipasi masyarakat adalah dikategorikan baik dengan nilai skor 3,16 dengan jawaban responden yaitu 24 responden (77,4%) menyatakan baik, 6 responden (19,4%) menyatakan sangat baik, 2 responden (3,2%) menyatakan kurang baik. Sesuai dengan metode yang digunakan Camat Tiroang dalam meningkatkan pembangunan adalah dengan menggerakkan partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Camat Tiroang pada tanggal 24 Juni 2013, antara lain:

“Pada prinsipnya saya setuju dengan pendapat di atas bahwa Camat Tiroang selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan harapan agar dapat terjalin kerjasama yang baik antara camat dengan masyarakat, meskipun masih ada sebagian kecil masyarakat tiroang masih menutup diri dan tidak mau mengembangkan kemampuan pribadinya secara terbuka akan tetapi sebagian besar masyarakat aktif dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan, masyarakat sudah menyadari bahwa partisipasi untuk menyalurkan pendapat, termasuk ide, buah pikiran, pengambilan putusan serta harta benda/materi mendapat perhatian yang sangat penting.”

1. Kerjasama

Untuk lebih tercapainya pembangunan di kecamatan, keterlibatan seorang camat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat juga sangat penting karena camat dapat mengetahui dan lebih memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat dan masyarakat juga dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada camat. Hasil olahan data menunjukkan bahwa kerjasama camat dalam kegiatan masyarakat dikategorikan sangat baik dengan skor 3,52, di mana 17 responden (54,9%) menyatakan sangat baik, 13 responden (41,9%) menyatakan baik, 2 responden (3,2%) menyatakan kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik. Dari hasil tersebut terlihat bahwa Camat Tiroang selalu terlibat dalam setiap kegiatan masyarakat dan memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Peranan camat dalam pembangunan juga perlu melibatkan masyarakat dan instansi-instansi terkait yang ada di kecamatan, di mana terlihat dari hasil penelitian bahwa faktor kerjasama camat dikategorikan sangat baik dengan skor 3,35, dengan hasil persentase yaitu 18 responden (58,1%) menyatakan baik, 12 responden (38,7%) menyatakan sangat baik, dan satu responden (3,2%) menyatakan kurang baik. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis pada tanggal 24 Juni 2013 sebagai berikut:

“Faktor kerjasama camat dalam pelaksanaan pembangunan adalah baik, Camat Tiroang selalu melibatkan masyarakat dan instansi-instansi terkait yang ada di kecamatan, hal ini diperlukan suatu koordinasi dari seorang camat sebagai pemimpin yang ada di kecamatan untuk melibatkan semua unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat agar pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.”

Hasil pengolahan data dari tiga indikator peranan camat sebagai koordinator dalam peningkatan pembangunan, yaitu indikator perencanaan, pengawasan, dan evaluasi, menghasilkan jumlah skor 10,19. Setelah ketiga indikator dijumlahkan maka diperoleh hasil 10,19 : 3 = 3,40 dengan kategori sangat baik, jadi dalam hal ini Camat Tiroang mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan yang ada di kecamatan. Di samping itu karena peranan camat dan juga partisipasi masyarakat sehingga tingkat kemajuan pembangunan menjadi jauh lebih baik dari tahun ke tahun.

1. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa peranan camat dalam peningkatan pembangunan adalah dikategorikan sangat baik hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya ketiga sub indikator baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, terutama dalam hal fungsinya sebagai koordinator dalam meningkatkan pembangunan yang ada di kecamatan. Begitu juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan camat. Keempat faktor tersebut dikategorikan sangat baik, yaitu faktor kemampuan camat, tanggung jawab, dan faktor kerjasama, sedangkan faktor partisipasi camat dikategorikan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulrachman, Arifin. 2001. *Kerangka Pokok Manajemen Umum*. Ikhtiar Baru Vanhoeven: Jakarta

*Anonim.* 2004. Citra Umbaran: Bandung

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.* Rineka Cipta: Jakarta

Bayu Suryaningrat. 1988. *Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Camat*. Patco: Jakarta

Friedman, Lawrence M. 2001. *American Law, An Introduction*. Tatanusa: Jakarta

Handayadiningrat, Soewono. 1992. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Haji Masagung: Jakarta

Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. BPFE: Yogyakarta

Jack C. Plano. 1994. *Peran Pemerintah Daerah.* Bina Aksara: Jakarta

James D. Money. 1994. *Administration (terjemahan)*. Arcan: Jakarta

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa. 2001. Edisi Keempat. Departemen Pendidikan Nasional. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Kartono, K. 2001. *Pemimpin dan Kepemimpinan.* Rajawali Pers. Jakarta

Kinseng, Rilus A. 2008. *Kecamatan di Era Otonomi Daerah, Status dan Wewenang serta Konflik*. LPPM IPB dan USAID: Bogor

Midgley, James. 2005. *Pembangunan sosial, perspektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial*. Deperta Depag RI: Jakarta

Mulyasa. E. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah.* Remaja Rosdakarya: Bandung

Nawawi, Hadawi. 1989. *Administrasi Pendidikan.* Haji Masagung: Jakarta

Nugroho. Iwan & R. Danuri. 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Lingkungan.* Pustaka LP3ES. IKAPI: Indonesia

Pramusinto, Drs. Agus dan Dr. Erwan A. Purwanto. 2009. *Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik.* Gava Media: Yogyakarta

Siagian, S. P. 2003. *Administrasi Pembangunan.* Bumi Aksara: Jakarta

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar.*  Raja Persada: Jakarta

Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat.* Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Pusat Bahasa Depniknas: Bandung

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi.* Alfabeta: Bandung

Sugiyono. 2008. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung

Supriatna, Tjahya. 1983. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah.* Bumi Aksara: Jakarta

Torang, Dr. Syamsir. 2012. *Metode Riset Struktur & Perilaku Organisasi*. Alfabeta: Bandung

Yopi Arsyah, P. 2011. *Jurnal Peran Kepemimpinan Camat dalam mensukseskan Pembangunan Desa*. [www.moh.rozikin.blogspot.com/2011/12/tentang](http://www.moh.rozikin.blogspot.com/2011/12/tentang) kepemimpinan. Diakses tanggal 10 April 2013, pukul 13:35:27